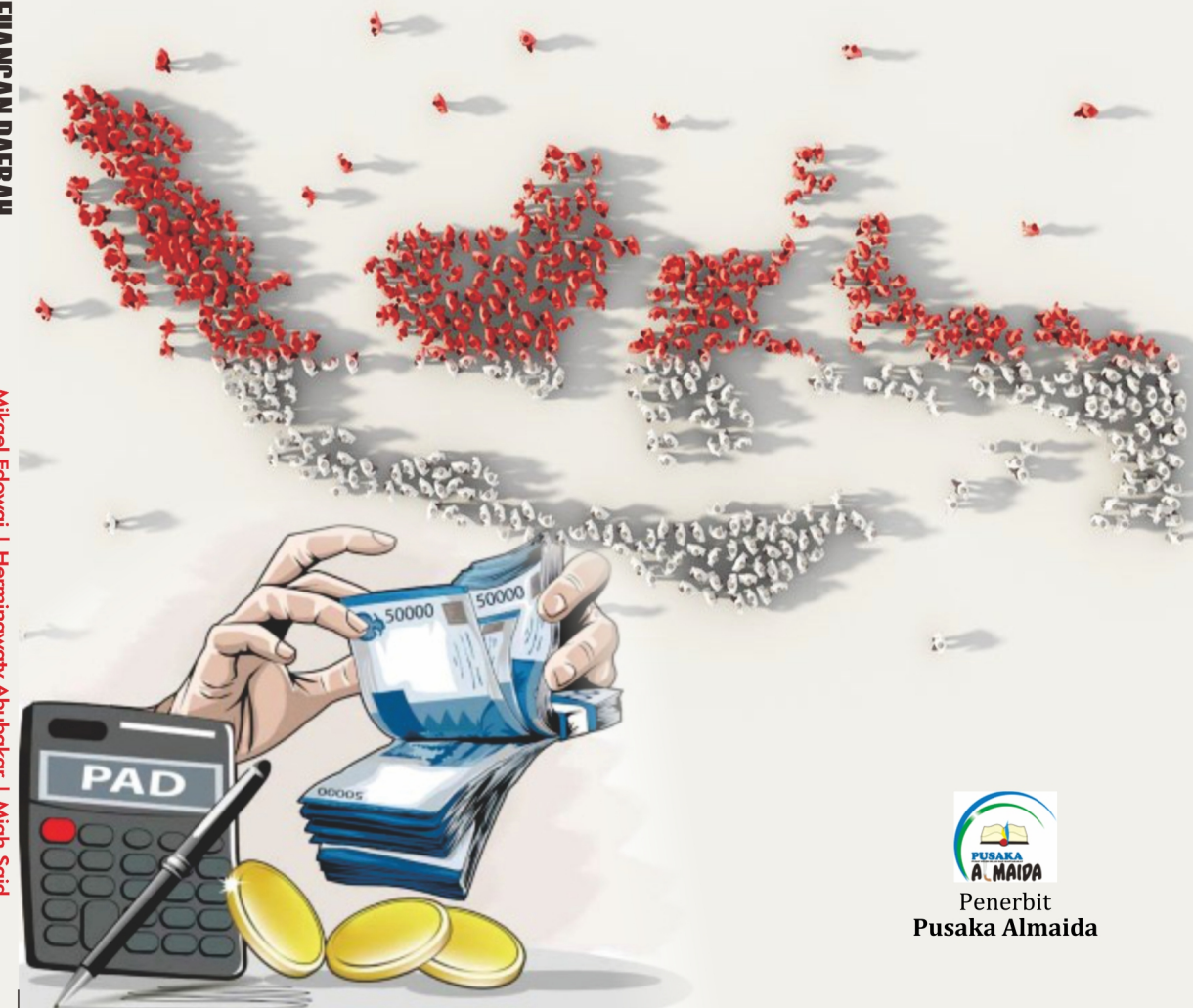


Di era reformasi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik akan membawa dampak terhadap tuntutan adanya akuntabilitas (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Wiguna, 2015). Jadi akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan pemerintah baik terhadap pengelolaan keuangan daerah maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah, sebaliknya jika tidak maka tidak dapat meningkatkan kinerja pemerintah karena hasil kinerja pemerintah akan diukur dari pencapaian akuntabilitas, dan transparansi.

Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan KEUANGAN DAERAH

Mikael Edowai | Herminawaty Abubakar | Miah Said



AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Mikael Edowai | Herminawaty Abubakar | Miah Said



PASCASARJANA
UNIVERSITAS
BOSOWA

ISBN 978-623-226-290-4



Penerbit
Pusaka Almailda

**Akuntabilitas &
Transparansi Pengelolaan
KEUANGAN DAERAH**

**Mikael Edowai
Herminawaty Abubakar
Miah Said**

AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI

Pengelolaan Keuangan Daerah

Copyright@Penulis 2021

Penulis:

Mikael Edowai

Herminawaty Abubakar

Miah Said

Editor:

A. Musfirah

Arwini Puspita

Hasriani

Tata Letak

Mutmainnah

vi+98 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2021

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-226-290-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida

Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18

Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul **“Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah”**. Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah implemintasi akademik.

Atas rahmat, berkah dan petunjuknya pulalah sehingga berbagi pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian penulisan buku ini dan dalam masa studi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin...

Makassar, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI	
KEUANGAN	7
A. Teori Agency	7
B. Good Governance	12
C. Pengertian Akuntabilitas	16
D. Jenis Akuntabilitas	21
E. Dimensi Akuntabilitas	23
F. Pengertian Transparansi	29
G. Manfaat Transparansi	33
H. Dimensi Transparansi dan Indikator	35
BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	39
A. Kinerja Pemerintah Daerah	39
B. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	42
C. Pendekatan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	44
D. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	46
E. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan	48

BAB IV PROFIL KABUPATEN DEIYAI	57
A. Gambaran Geografis	57
B. Potensi Wilayah	58
C. Kondisi Topografis	59
D. Visi dan Misi Kabupaten Deiyai	60
 BAB V ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN	 63
A. Karakteristik Responden	63
B. Deskripsi Distribusi Tanggapan Responden mengenai Akuntabilitas, Transparansi serta Kinerja Pemerintah Daerah	68
C. Uji Instrumen Penelitian	76
D. Analisis Regresi dan Korelasi Linear Berganda	81
E. Koefisien Determinasi (R ²)	82
F. Pengujian Hipotesis	83
G. Pembahasan Hasil Penelitian	85
 BAB VI PENUTUP	 91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
 Daftar Pustaka	 93

BAB I

PENDAHULUAN

Di era sekarang ini penyelenggaraan organisasi publik berdasarkan tata kelola yang baik menjadi suatu keharusan karena dengan adanya pedoman dan arah yang jelas dalam pengelolaan, diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan organisasi. Tuntutan penerapan tata kelola yang baik menjadi keharusan dan berlaku bagi setiap organisasi khususnya di sektor pemerintahan.

Tuntutan akan kinerja yang baik terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan (Bharata, 2015). Kinerja dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunannya. Pelaksanaan pembangunan harus mengarah kepada penciptaan *good governance* yang diterjemahkan sebagai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Dalam organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kinerja pemerintah daerah menurut Mahsun (2016:25) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan.

Untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik maka Akbar (2012) mengatakan bahwa era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan adanya akuntabilitas (*accountability*) dan keterbukaan (*transparency*) dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik dan keterbukaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi logis dalam penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Wiguna, 2015). Jadi akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan pemerintah baik terhadap pengelolaan keuangan daerah maka dapat meningkatkan kinerja pemerintah, sebaliknya

jika tidak maka tidak dapat meningkatkan kinerja pemerintah karena hasil kinerja pemerintah akan diukur dari pencapaian akuntabilitas, dan transparansi.

Akuntabilitas mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, Kusumastuti (2014:2) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik. Nasution (2017) dan Wiguna, dkk (2015) dimana hasil temuan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah.

Kemudian transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Tanjung (2014:11) mengatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan. Transparansi dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat secara jelas semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian Adiwirya dan Sudana (2015) dan Riswanto (2016) menemukan bahwa secara parsial transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan termasuk juga pada Kantor Pemerintah Daerah di Kabupaten Deiyai. Sebagai instansi pemerintah dengan visi yakni membangun Deiyai menuju kota *BERIMAN* yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera serta mewujudkan suatu kesejahteraan umum Kota Deiyai. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dilakukan sejumlah misi yaitu : a) Menjadikan Kota Deiyai Agamais, hidup takut dan taat kepada Tuhan, b) Mewujudkan Kota Deiyai yang makin bersih, rapi, indah, manusiawi, aman dan nyaman serta c) Mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka perlunya diperhatikan kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai, dimana Fenomena yang terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Deiyai berdasarkan kinerja kerja daerah masih belum memenuhi harapan publik atau masyarakat di Kabupaten Deiyai. Dimana masih kurangnya akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan pada lembaga pemerintah dan masih kurangnya prinsip transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Deiyai. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya penerapan prinsip transparansi keuangan yang masih belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yaitu masyarakat ingin mengetahui secara pasti tentang penggunaan dana publik dan bentuk pertanggungjawaban dana publik yang telah digunakan oleh Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Sehingga dengan adanya kinerja pemerintah keuangan daerah yang akurat akan menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam setiap kegiatan sehingga kegiatan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyebabkan pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik.

BAB II

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN

A. Teori Agency

Agency Theory atau teori agensi merupakan bidang yang populer akhir-akhir ini. Teori ini menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau *intersection point* bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Teori ini bercerita tentang monitoring berbagai macam biaya dan memaksakan hubungan diantara berbagai kelompok. Teori agensi adalah suatu arah yang baru tentang keagenan. Korporasi adalah tempat atau titik persimpangan dari banyak hubungan jenis sesuai kontrak yang ada antar manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Teori keagenan yang mulai berkembang mengacu kepada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut agen. Ketidakmampuan atau keengganan manajer untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut masalah keagenan.

Salah satu hipotesis dalam teori agensi ini adalah bahwa manajemen akan mencoba memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan cara meminimalisir

berbagai biaya agency. Hipotesis ini tidak sama artinya dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa manajemen mencoba memaksimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*). Oleh karena itu, manajemen diasumsikan akan memilih prinsip akuntansi yang sesuai dengan tujuannya memaksimalkan kepentingannya. Pendekatan dalam teori agency ini bisa induktif atau deduktif. Pendekatan teori agency ini bukan bidang keuangan atau ekonomi tetapi psikologi dan sosiologi.

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (principal) dan manajemen organisasi (*agency*). Di dalam organisasi sektor publik, pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Hubungan kontrak yang terbentuk di antara keduanya berfokus pada peran pemerintah sebagai pengemban tugas untuk memberikan pelayanan publik. Namun, dalam prakteknya pemerintah terkadang bertindak di luar dari fungsinya dengan membatasi akses informasi masyarakat. Pembatasan tersebut menimbulkan konflik yang disebabkan ketidakseimbangan kepemilikan informasi antara agen dan principal. Dengan adanya batasan tersebut ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi pemerintah terhadap hasil evaluasi kinerjanya akan menurun.

Konsep Agency Theory menurut Scott (2015 : 125) adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent, dimana principal adalah pihak yang mempekerjakan agent agar melakukan tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang menjalankan kepentingan principal.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi dari teori agensi adalah hubungan antara principal (pemilik/pemegang saham) dan agent (manajer). Dan di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana pihak principal memberi wewenang kepada agent untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik bagi principal.

Teori agensi memberikan peranan penting bagi akuntansi terutama dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Peranan ini sering diasosiasikan dengan peran pengurusan (*stewardship*) akuntansi, dimana seorang agen melapor kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Inilah yang memberi akuntansi nilai umpan baliknya selain nilai prediktifnya.

Dimana nilai umpan balik menjelaskan bahwa informasi juga mempunyai peran penting dalam menguatkan atau mengoreksi harapan-harapan sebelumnya. Suatu keputusan jarang sekali dibuat secara terpisah. Informasi mengenai hasil dari suatu keputusan seringkali merupakan masukan kunci dalam pengambilan keputusan berikutnya. Akuntansi idealnya menyediakan jasa yang sama bagi investor, dengan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi investasi mereka sepanjang waktu.

Dari model ini dan perluasannya dapat diambil beberapa pengertian. Perluasan ini sebagian besar berhubungan dengan cara kedua belah pihak tersebut berbagi risiko dan informasi. Misalnya, para pemilik yang menghindari risiko diasumsikan menanggung risiko bisnis.

Sementara para manajer bertindak sebagai agen-agen yang netral terhadap risiko yang dimaksud. Dengan menggunakan teori keagenan yang sama, jika manajemen bersikap tidak membedakan terhadap risiko sedangkan pemilik menghindari risiko, maka manajemenlah dan bukan pemilik yang akan menanggung risiko tersebut.

Menurut Fahmi (2014:19-20), *agency theory* (teori keagenan) merupakan suatu kondisi yang terjadi pada suatu perusahaan dimana pihak manajemen sebagai pelaksana yang disebut lebih jauh sebagai agen dan pemilik modal (owner) sebagai prinsipal membangun sebuah kontrak kerjasama yang disebut dengan “nexus of contract”, kontrak kerjasama ini berisi kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus bekerja secara maksimal untuk memberi kepuasan yang maksimal seperti profit yang tinggi kepada pemilik modal (*owner*). Implikasinya memungkinkan terjadinya sikap oportunistik (*opportunistic behaviour*) dikalangan manajemen perusahaan dalam melakukan beberapa tindakan yang sifatnya disengaja seperti:

- a. Melaporkan piutang tak tertagih (*bad debt*) yang lebih besar dari kenyataan yang sesungguhnya.
- b. Melaporkan hasil penjualan dengan peningkatan yang tidak terlalu tinggi.
- c. Melaporkan kepada pihak principal bahwa dibutuhkan dana tambahan untuk menunjang pelaksanaan proyek yang sedang dikerjakan jika tidak dibantu maka proyek akan terhenti.

- d. Melakukan income smooting, berupa melaporkan pendapatan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, namun sesuai dengan maksud dan keinginan agen (manajemen).

Pada umumnya manajer dan pemegang saham sering memiliki tujuan yang berbeda. Pengambilan keputusan oleh manajer sering tidak berpihak kepada kepentingan pemegang saham, melainkan berpihak kepada kepentingan manajer itu sendiri. Perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan konflik yang sering disebut konflik agensi (agency conflict). Pada perusahaan besar konflik agensi sering terjadi dikarenakan kepemilikan saham oleh manajer memiliki persentase yang relatif kecil. Sehingga manajer sering membuat keputusan-keputusan yang tidak menguntungkan pemegang saham. Manajer tidak berani mengambil risiko yang besar yang tentu memiliki keuntungan yang besar pula dikarenakan takut kehilangan jabatan atau posisi yang strategis dalam perusahaan. Sehingga manajer cenderung mengambil risiko yang relatif kecil yang memiliki keuntungan yang kecil yang tidak dapat memuaskan keinginan daripada pemegang saham. Selain itu, konflik juga mungkin disebabkan oleh banyaknya uang kas yang tersedia didalam perusahaan. Manajer sering menggunakan uang kas tersebut untuk membiayai proyek yang menguntungkan dirinya sendiri seperti perlengkapan kantor yang mewah, tiket untuk bepergian keluar negeri, dan lain sebagainya.

Didalam hubungan keagenan, manajer merupakan pihak yang memiliki informasi penuh yang ada didalam perusahaan, dimulai dari lingkungan kerja, kapasitas diri, dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Tetapi terkadang ada saja informasi mengenai perusahaan yang tidak diungkapkan oleh manajer kepada investor. Untuk mengurangi hal tersebut dibutuhkan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan apa yang dilakukan oleh manajer telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam perusahaan. Pengawasan dan pengendalian ini membutuhkan biaya yang biasa disebut sebagai *agency cost*. *Agency cost* digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku manajer agar tidak menyimpang dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemegang saham. Selain itu menurut Dermawan (2014:273), *agency cost* adalah biaya yang timbul karena perusahaan menggunakan utang dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditor. Jika perusahaan menggunakan utang ada kemungkinan pemilik perusahaan melakukan tindakan yang merugikan kreditor. Misalnya, perusahaan melakukan investasi pada proyek-proyek yang berisiko tinggi hal ini dapat merugikan kreditor.

B. Good Governance

Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan

pengecahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan masalah yang paling penting dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatkannya tingkat

pengetahuan masyarakat disamping adanya pengaruh globalisasi. Ganie Rochman (2012:145) menyebutkan *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain.

Menurut Sutedi, (2011 : 3) mengatakan bahwa untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *Good Government Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional.

Pengertian *Good Governance* menurut Agoes (2013:101) sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Kutipan diatas dapat diartikan bahwa *good governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak

kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengarahkan dan mengendalikan.

Sehingga dapat dilihat bahwa definisi yang dikemukakan menurut *World Bank* lebih pada cara pemerintahan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan menurut UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan Negara. *Politic governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy/strategy formulation). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada system implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2018 : 17).

Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good government governance*, *World Bank* mendefinisikan *good government governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dengan kerangka politik (*politic framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2018 : 17).

Implementasi *Good Government Governance* (GGG) dalam pemerintah daerah secara sederhana adalah dengan menerapkan prinsip *Good Government Governance* (GGG) ke dalam sistem dan pengelolaan pemerintahan daerah dengan baik dan benar. *Good Government Governance* (GGG) sebagai suatu konsep dalam menjalankan pemerintahan tidak terhenti hanya sampai pemahaman saja, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dalam langkah kongkret sehingga dapat memberikan manfaat pada seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.

C. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas merupakan syarat dasar untuk mencegah penyalagunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi.

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan

Mardiasmo (2018:27) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang

amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawabandan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper-tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Adisasmita (2011: 30), mengatakan bahwa akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban individu atau kelompok terhadap unit organisasi untuk setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Krina, (2013:133) menjelaskan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Lebih lanjut Krina juga menyebutkan bahwa akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintahsehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances system).

Kemudian, akuntabilitas menurut Tanjung (2014:11) mengatakan bahwa mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Definisi akuntabilitas publik menurut Kusumastuti (2014:2) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.

Berdasarkan dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas itu sendiri mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan. Dengan kata lain, akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggung jawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis AkruaI dapat dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Dengan ditetapkannya PP 71 Tahun 2010 tentang SAP ini maka PP 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun meski sudah dinyatakan berlaku secara substansial PP 24 Tahun 2005 masih dilaksanakan dalam rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan berbasis Kas Menuju AkruaI kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akruaI. Substansi PP 24 Tahun 2005 ini dinyatakan dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Pengertian menurut Mahmudi (2016:19) akuntabilitas publik adalah adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (principal).”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian akuntabilitas publik yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan

kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan memiliki arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju clean governance atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

Dalam konteks politik, secara singkat *accountability* mencakup harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi mandat dan penerima mandat, sedangkan dalam konsep yang lebih luas *accountability* memungkinkan adanya *negative feedback* setelah keputusan atau tindakan diambil, sehingga *accountability* memiliki fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik oleh suatu institusi akuntabilitas tidak hanya dimaknai dari konteks politik. Dalam konteks kebijakan pun dapat dilihat bagaimana mandat itu dilaksanakan untuk memenuhi aspirasi politik masyarakat. Segala hal yang meliputi cara pilihan kebijakan ditetapkan, cara kebijakan dilaksanakan dan didelegasikan, bagaimana kewenangan diberikan, dan bagaimana program dilaksanakan adalah sepenuhnya berdasarkan pada konteks-tualitas politik. Jika pemahamannya seperti itu maka konsep ini tidak lain merupakan konsekuensi politik dari akuntabilitas, Wibisono (2018:6).

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah

kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah.

D. Jenis Akuntabilitas

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Menurut Ulum (2015:42) tipe akuntabilitas dibeda menjadi dua bagian yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggaraan pemerintah Negara termasuk juga pemerintah yang mana masing-masing pejabat atau pengurus publik baik individu ataupun kelompok secara tingkatan wajib untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung tentang perkembangan kinerja aktivitas secara periodik ataupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

2. Akuntabilitas Eksternal

Akuntabilitas yang menempel kepada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang sudah diterima dan dilakukan maupun perkembangan untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Menurut Supriatna (2015:102) akuntabilitas dapat dibedakan atas : *democratic accountability, professional accountability, dan legal accountability*, dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *Democratic Accountability*

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative dan *politic accountability*. Menggambarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara-negara demokratis, menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing. Dalam konteks ini pelaksanaan akuntabel dilakukan secara berjenjang dari pimpinan bawah ke pimpinan tingkat tinggi secara hierarki yaitu Presiden pada MPR.

2. *Professional Accountability*

Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat.

3. *Legal Accountability*

Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan *public goods dan public service* yang merupakan tuntutan (demand) masyarakat (*costumer*). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tipe akuntabilitas diantaranya akuntabilitas internal, akuntabilitas eksternal, akuntabilitas demokratis, akuntabilitas profesional dan kategori akuntabilitas legal (hukum).

E. Dimensi Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menjadi landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas dan pelaksanaan kerjanya kepada publik. Dalam konteks organisasi pemerintahan sendiri, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (stakeholder). Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa aspek. Dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2016:19) adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality).

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam

bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dengan pelayanan publik, maka indikator dari akuntabilitas hukum adalah :

- a. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.
 - b. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan.
 - c. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.
2. Akuntabilitas Manajerial (managerial accountability). Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability). Inefisiensi organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau customer-nya.

Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (process accountability) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektivan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial. Menurut *discussion paper by Office of the Auditor General of Canada and Treasury Board* Sekretariat Canada dalam Akram Khan (2012) indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut:

- a. Peran yang Jelas Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. Kemungkinan adanya siapa pun yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah, dan menjadi sulit.
- b. Harapan dan kinerja yang Jelas Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target, tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.
- c. Pelaporan kredibel Pelaporan kinerja berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektivitas akuntabilitas.

- d. Ulasan wajar dan penyesuaian Harus ada tindak lanjut di mana harapan tentang kinerja belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala.
3. Akuntabilitas Program (program accountability). Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. Indikator akuntabilitas program menurut Halim (2016 : 103) adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil dari program yang dijalankan.
 - b. Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program.
 - c. Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program.
 4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability). Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan

dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholders) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut. Indikator akuntabilitas kebijakan menurut Halim (2016 : 103) adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Keatas (*Upward Accountability*)
Menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif.
 - b. Akuntabilitas Keluar (*Outward Accountability*)
Bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan stakeholders dalam masyarakat.
 - c. Akuntabilitas Kebawah (*Downward*)
Menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebegus apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai.
5. Akuntabilitas Finansial (*financial accountability*).
Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (money public) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat

penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik. Akuntabilitas finansial menurut Mgadla Xaba and Duminase Ngubane (2010 : 214) adalah sebagai berikut: *“Financial accountability describes the systems and procedures used to keep track of financial and monetary transactions that take place inside an organisation and therefore it is a system of recording, classifying and summarising information for various purposes. According to idasa (2004), financial accountability refers to producing regular financial reports to those with an interest and a right to know, proving that leadership has control over financial decision and accounting for funds by producing documentary proof of receipts and payments.”*

Indikator dari akuntabilitas finansial adalah:

- a. Integritas keuangan. Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi.
- b. Pengungkapan. Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.
- c. Ketaatan. Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi

dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

F. Pengertian Transparansi

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*.

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan

informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Coryanata, (2015 : 99).

Krina (2013:133) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Selanjutnya, Krina (2013:133) juga menjelaskan bahwa prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu : (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah sesuatu mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik. Lebih jauh lagi, transparansi juga terdapat dalam PP. Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Definisi Transparansi menurut Tanjung (2014:11) mengatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut David O. Renz (2016:103) definisi transparansi yaitu sebagai berikut: *“Transparency which involves collecting information and making it available and accessible for public scrutiny.”*

Kemudian transparansi menurut Mursyidi (2015:44) yaitu sebagai berikut: *“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”*

Secara harafiah transparansi adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh atau keterbukaan, dengan demikian transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Sedangkan menurut Nordiawan (2012: 129) Transparansi adalah sebagai berikut :*“Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa*

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Menurut Tahir (2011:162) Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (fairness) dapat ditumbuhkan.

Konsep transparansi adalah nilai utama dari sistem pemerintahan, konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakikatnya ada kaitan dengan percepatan dan pengaruh organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini merupakan tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat.

Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Ratminto (2015:2) yaitu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.

Dari beberapa konsep yang telah dijabarkan, pelayanan pada intinya mencakup dua hal penting, yakni pelayanan merupakan sesuatu yang tidak bernilai secara

fisik atau tidak kasat mata, serta pelayanan melibatkan upaya manusia atau peralatan lain yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan.

Selain itu Mahsun (2015:32) menyatakan bahwa transparansi adalah sebagai berikut : “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian transparansi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

G. Manfaat Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan

aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Beberapa manfaat penting adanya transparansi menurut Andrianto (2017:21), terdiri dari beberapa manfaat adanya transparansi yaitu:

1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi.
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.

H. Dimensi Transparansi dan Indikator

Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi tanpa ada yang dirahasi akan oleh pengelola kepada para pemangku kepentingan. Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi menurut Mardiasmo (2018 :19) adalah sebagai berikut:

1. Informativeness (informatif), yaitu pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif menurut Mardiasmo (2018:19) antara lain adalah:

- a. Tepat waktu.
Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
 - b. Memadai.
Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
 - c. Jelas.
Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
 - d. Akurat.
Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
 - e. Dapat diperbandingkan
Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
 - f. Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.
2. Openness (Keterbukaan), yaitu Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk

memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

Disclosure (pengungkapan), yaitu pengungkapan kepada masyarakat atau publik (stakeholders) atas aktifitas dan kinerja finansial.

- a. Kondisi Keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
- b. Susunan pengurus. Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
- c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

BAB III

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

A. Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah atau organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator

kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Selanjutnya, dikatakan bahwa pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectives) dengan elemen kunci sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penetapan tujuan.
- b. Pengembangan ukuran yang relevan.
- c. Pelaporan formal atas hasil.
- d. Penggunaan informasi.

Pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang baru. Tiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksana tugas telah diprogram untuk mengumpulkan informasi berupa laporan berkala (triwulan atau semester/tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Namunsayangnya, pelaporan ini lebih memfokuskan pada input (masukan) seperti jumlah tenaga, dana, dan lain-lain.

Kadang kala ada juga instansi yang melaporkan output (keluaran) dari program yang dilaksanakan, misalnya jumlah kilometer jalan maupun unit jembatan yang dibangun, jumlah transmigran yang berhasil dipindahkan, dan lain-lain. Informasi atas input dan output dari pelaporan tersebut bukannya tidak penting, namun melalui pengukuran kinerja fokus pelaporan bergeser dari besarnya jumlah sumber daya yang dialokasikan ke hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya tersebut.

Ada beberapa definisi tentang kinerja diantaranya adalah: Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Depkeu, 2014)

Adapun pengertian kinerja pemerintah daerah yang dinyatakan oleh Chabib Soleh dan Suropto (2011:3) mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi”.

Kemudian Menurut Bastian (2010:329) bahwa Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi”. Menurut Mahsun (2016:25) Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

B. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting bagi proses pengendalian manajemen bagi sektor publik. Mahmudi (2016:14) mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan.
2. Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai.
Pengukuran kinerja merupakan sarana pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, skill, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.
3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya.
Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment. Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji dan promosi, atau

punishment misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.

5. Memotivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward. Reward tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi.
6. Menciptakan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas.

Sedangkan manfaat pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan menurut Mardiasmo (2018:122) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan-nya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;

6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; dan
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

C. Pendekatan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja organisasi sektor publik yang bersifat multidimensional memiliki makna bahwa tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif untuk semua jenis organisasi sektor publik. Indikator kinerja yang dipilih akan sangat bergantung pada faktor kritikal keberhasilan yang telah diidentifikasi. Karena adanya sifat multidimensional atas kinerja organisasi sektor publik tersebut maka pengukuran kinerja haruslah dibuat sekomprensif mungkin dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi kinerja. Menurut Mahsun (2016:131) terdapat empat pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Analisis Anggaran Adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya. Hasil yang diperoleh berupa selisih lebih (*favourable variance*) atau selisih kurang (*unfavourable variance*). Teknik ini berfokus pada kinerja input yang bersifat finansial. Data yang digunakan untuk dasar analisis adalah anggaran dan laporan realisasi anggaran.

2. Analisis Rasio Laporan Keuangan Analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengukuran kinerja didasarkan atas penghitungan rasio-rasio keuangan, misalnya rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio pasar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio aktivitas mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset tersebut. Rasio solvabilitas mengukur sejauh mana kemampuan organisasi memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio pasar mengetahui perkembangan nilai organisasi relatif terhadap nilai buku organisasi tersebut. Data yang digunakan sebagai dasar untuk analisis ini adalah neraca.
3. *Balanced Scorecard Method* Pengukuran kinerja dengan berbasis pada aspek finansial dan nonfinansial Dimensi pengukuran mencakup 4 (empat) perspektif yaitu perspektif finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal dan perspektif inovasi-pembelajaran.
4. Performance Audit (*Pengukuran Value for Money*) Pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggarannya. Efisiensi berhubungan dengan pengukuran

seberapa benar cara yang digunakan yaitu membandingkan input dengan output. Sedangkan efektifitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam pencapaian target yaitu dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan realisasinya.

D. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2016:132) ada beberapa komponen dalam pengukuran kinerja yaitu:

- a. Ekonomi
- b. Efisiensi
- c. Efektivitas

Adapun penjelasan dari indikator di atas:

1. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (Mardiasmo, 2018). Mahmudi (2016) mengartikan ekonomi sebagai perbandingan antara input sekunder (bahan baku, personel, dan infrastruktur) dengan input primer (Kas). Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiaya aktivitas tertentu. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada dibawah anggaran maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya, apabila di atas anggaran maka terjadi pemborosan.

2. Efisiensi

Merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2018). Ukuran efisiensi mengukur biaya atas *output* (*cost of output*). Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan *output* (Mahmudi, 2016). Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Ukuran produktivitas atau efisiensi belum mengindikasikan efektivitas, ukuran efisiensi lebih bersifat relatif. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

3. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan *outputnya* (*cost of outcome*).

E. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan

Dalam suatu penelitian, diperlukan sebuah pijakan berupa penelitian terdahulu. Tujuannya adalah untuk memperjelas posisi penelitian lanjutan, apakah mendukung, menolak, atau mengambil aspek lain yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang diketahui memiliki relevansi dan metode dengan penelitian yang dikemukakan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya adalah :

Zulkifli Umar, dkk (2018) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. Hasil secara simultan menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh, akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,155 dan transparansi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja instansi para auditor pada Kantor Inspektorat Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,137. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa akuntabilitas dan transparansi yang dimiliki oleh auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor Inspektorat Aceh.

Riswanto, Natak, (2016) Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas

dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember semakin baik.

Dito Aditia DarmaNasutio, (2017) Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai secara parsial pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Secara parsial transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Md Budi Sastrawan Wiguna. dkk (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi

Bengkulu. Dalam hal ini, semakintinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan semakin baik. Akan tetapi dalam penerapan transparansi, beberapa SKPD belum melakukan azas-azas transparansi secara optimal.

Lucy Auditya, (2013) Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan semakin baik. Akan tetapi dalam penerapan transparansi, beberapa SKPD belum melakukan azas-azas transparansi secara optimal.

Fanny Jitmau, dkk (2017) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong) Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, fungsi

pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Fifit Purnama (2016) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Abdya.

Ait Novatiani, R. (2019) Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah baik, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan.

Novya Nurul Istiqomah, (2017) Analisis Akuntabilitas, Tarnsparansi, Partisipasi Masyarakat dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan pengelolaan keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa.

Riswanto (2016) telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah

Daerah. Hasil penelitian ini adalah secara parsial akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Jember.

Adiwirya dan Sudana (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran berbasis kinerja SKPD Kota Denpasar. Sedangkan secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan dan transparansi secara signifikan positif mempengaruhi anggaran berbasis kinerja.

Toni Nurhadianto, dkk (2019) Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah : Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih dalam kategori sedikit (Scant or None) atau tidak cukup transparan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Selain itu, daerah yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi memiliki karakteristik opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang cukup banyak. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan

transparansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Made Budi Sastra Wiguna, (2015) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, (2) akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, (3) transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, (4) pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

Untuk lebih jelasnya dikemukakan keterkaitan pengaruh akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Daerah dapat dilihat melalui uraian dibawah ini

1. Hubungan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemegang amanah terhadap orang atau bentuk yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan

Mardiasmo (2018:27) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawabandan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper-tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lucy Auditya dan Husaini Lismawati (2013) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD makan akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu.

2. Hubungan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap kinerja

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu informasi seperti

peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik, dapat diartikan bahwa transparansi dibuat agar kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat diawasi. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan, dan dengan adanya keterbukaan informasi maka publik dapat ikut serta dalam memberikan aspirasi/suara dalam pengambilan keputusan meskipun hanya di beberapa komponen saja. Transparansi pula dapat membantu mengurangi peluang kecurangan seperti korupsi dan lainnya di kalangan pemerintah karena terlihat semua proses dan hasil dari kegiatan aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Tanjung (2014:11) mengatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiwirya (2015) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Denpasar tentang akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif pada anggaran yang berbasis kinerja. Transparansi memang diharapkan memiliki peranan yang sangat penting dalam

penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini juga membuktikan bahwa para responden menempatkan keterbukaan atau transparansi sebagai faktor yang lebih penting dari pada faktor akuntabilitas.

BAB IV

PROFIL KABUPATEN DEIYAI

A. Gambaran Geografis

Kabupaten Deiyai yang terletak di timur Indonesia Provinsi Papua merupakan Kabupaten terbaru yang dimekarkan pada tahun 2009 dari Kabupaten Paniai. Dengan luas wilayah 412.31 km² atau 2% dari luas wilayah provinsi Papua, dengan jumlah penduduk 76.869 jiwa. Kabupaten Deiyai terletak di bagian barat provinsi Papua atau bagian tengah pulau Papua pada 3°57'57"–4°29'11" Lintang Selatan dan 135°57'7"–136°54'43" Bujur Timur. Secara Geografis, Kabupaten Deiyai terdiri dari 5 (lima) distrik yaitu Distrik Tigi, Distrik Kaporaya, Distrik Tigi Barat, Distrik Tigi Timur dan Distrik Bowobado. Batas wilayah administratif Kabupaten Deiyai adalah sebagai berikut :

Bagian Utara : Kabupaten Paniai

Bagian Selatan: Kabupaten Mimika

Bagian Timur: Kabupaten Paniai

Bagian Barat: Kabupaten Dogiyai

Kabupaten Deiyai adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Dulunya pernah menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Paniai. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Dasar hukum pembentukan kabupaten ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 55. Pusat pemerintahan berada di Tigi. "Pemekaran diharapkan tidak membebani keuangan negara," kata Menteri Dalam Negeri Mardiyanto saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam rapat paripurna pengesahan pembentukan 12 daerah pemekaran baru di Gedung MPR/DPR, Rabu (29/10). Ke-12 daerah baru tersebut, yaitu Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Pringsewu (ketiganya di Provinsi Lampung), Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat (di Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Tombrauw (Provinsi Papua Barat). Kemudian Kabupaten Pularu Morotai (Provinsi Maluku Utara), Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai (di Provinsi Papua), Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta Kabupaten Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

B. Potensi Wilayah

Dilihat dari Luas Wilayah Kabupaten Deiyai, terdapat 5 Distrik yang mempunyai presentase tidaksama terhadap luas wilayah. Yang pertama yaitu Distrik Bowobado mencapai persentase 54,66% dengan luas wilayah Distrik 223,35 km², yang ke dua Distrik Kapiraya mencapai persentase 28,19% dengan luas wilayah Distrik 116,23km², yang ketiga Distrik Tigi Barat mencapai persentase 9,00% dengan luas wilayah Distrik 37,10 km², yang keempat Distrik Tigi Timur mencapai persentase 4,64% dengan luas wilayah Distrik 19,12km², dan yang kelima Distrik yang mempunyai luas terkecil adalah Distrik Tigi dengan luas 14,49km² atau hanya 3,51% dari luas Kabupaten

Deiyai. Wilayah Kabupaten Deiyai merupakan dataran tinggi, ketinggiannya berkisar antara 1500 s/d 2000 meter dari permukaan air laut. Dengan kemiringan wilayah Kabupaten Deiyai antara 0%–70%.

C. Kondisi Topografis

Sebagian besar wilayah Kabupaten Deiyai merupakan daerah pedataran rendah-sedang sampai dataran tinggi dengan topografi praktis rata-rata perbukitan. Pada sektor tengah mulai dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai sampai miring, dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Sejalan dengan fisiografi wilayah, proporsi dari areal-areal yang bertopografi lebih berat adalah lebih tinggi pada daerah-daerah yang berada di kawasan atas; sebaliknya areal-areal bertopografi lebih ringan sangat tinggi pada daerah-daerah yang berada di kawasan bawah.

Kabupaten Deiyai merupakan Kabupaten baru yang dimekarkan dari Kabupaten Induk Paniai, diresmikan sebagai kabupaten baru dengan diberlakukan Undang-Undang No.55 tahun 2008. Kabupaten Deiyai secara geografis terletak pada 40 02 42,12 Lintang Selatan dan 1360 16 48,32" Bujur Timur ditinggikan 1700 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten yang wilayahnya mengelilingi Danau Tigi ini beribu kota di Distrik Tigi. Bupati nya sekarang berkantor di kota Waghete, yang masuk wilayah Distrik Tigi. Kantor

Bupati baru selesai dibangun pada 2010, dibangun di atas tanah seluas 500 x 300 meter persegi, yang dibeli dari masyarakat setempat. Kota Waghete terletak dipinggir danau purba yang berada di Provinsi Papua, yakni danau Tigi, wilayah Tigi merupakan satuan lembah dengan kemiringan 0-15%, sedangkan kota Waghete sendiri secara keseluruhan kondisi topografi wilayahnya cukup bervariasi yaitu antara 0 s/d 45% ketinggian >45% terlihat disekitar area rencana pengembangan bandara disekitar wilayah tengah dan utara, ketinggian relatif datar 0-15% terlihat dibagian selatan, utara, dan terutama disekitar danau Tigi.

D. Visi dan Misi Kabupaten Deiyai

Visi Kabupaten Deiyai adalah "Membangun Deiyai menuju Kabupaten **BERIMAN** yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera serta mewujudkan suatu kesejahteraan umum Kabupaten Deiyai yang berlandaskan "**BERIMAN**". Beriman menggarap potensi, bijak memanfaatkan peluang dan bersier memecahkan masalah untuk mencapai masyarakat sejahtera yang maju dan mandiri. "**BERIMAN**" sebagai akronim dari bersih, rapi, indah, manusiawi, aman dan nyaman maka motto tadi perlu diabadikan sekaligus sebagai visi Kota Deiyai. Secara maknawiyah "**BERIMAN**" berarti yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta takwa atas aturannya. Bila hal itu dijadikan sebagai landasan bertindak bagi masyarakat Kabupaten Deiyai maka akan memperoleh keberhasilan yang maksimal.

Dalam rangka mencapai visi tersebut di atas, maka Misi Kabupaten Deiyai adalah :

- a. Menjadikan Kabupaten Deiyai Agamais, hidup takut dan taat kepada Tuhan.
- b. Mewujudkan Kabupaten Deiyai yang makin bersih, rapi, indah, manusiawi, aman dan nyaman.
- c. Mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan.

BAB V

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Karakteristik Responden

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden adalah profil terhadap obyek penelitian yang dapat memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian mengenai Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai, dimana dalam pelaksanaan penelitian ini maka populasi yang ditentukan adalah beberapa pegawai yang ada pada 3 SKPD Kabupaten Deiyai yaitu Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah karena dipandang telah memiliki pemahaman terhadap situasi dan kondisi yang ada di dalam SKPD yaitu sebanyak 80 responden. Sedangkan dari hasil pembagian kuesioner maka semua responden telah mengembalikan kuesioner dan dapat diolah lebih lanjut.

Adapun deskripsi karakteristik responden dimaksudkan untuk memberikan gambaran identitas responden yang menjadi sampel penelitian. Dimana deskripsi karakteristik responden dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian menurut umur, jenis kelamin, tingkat

pendidikan terakhir, masa kerja dan status. Berdasarkan data responden yang telah diolah dengan menggunakan tabulasi silang, maka dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan terperinci mengenai jumlah total dari setiap item yang ditanyakan dalam kuesioner, sehingga akan lebih mudah untuk diinterpretasikan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan uraian mengenai deskripsi karakteristik responden yang dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

a) Identitas Responden Menurut Umur

Deskripsi identitas responden menurut umur menggambarkan tingkat pengalaman dan kedewasaan pola pikir seorang responden. Sebab semakin tinggi umur responden maka akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. Adapun deskripsi identitas responden menurut umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Identitas Responden Menurut Umur

Umur	Frekuensi Jawaban Responden	
	(Orang)	(%)
< 25 tahun	17	21,3
25-30 tahun	20	25,0
31-40 tahun	24	30,0
41-49 tahun	13	16,3
> 50 tahun	6	7,5
	80	100,0

Sumber : Hasil olahan data, 2021

Berdasarkan tabel 5.1 yakni deskripsi identitas responden menurut umur, dari 80 responden yang diteliti maka didominasi oleh responden yang berumur antara 31-40 tahun dengan jumlah responden sebanyak 24 orang (30%),

kemudian responden yang berumur antara 25-30 tahun yakni sebanyak 20 orang (25%). Hal ini dipersepsikan bahwa pegawai yang bekerja pada 3 SKPD Kabupaten Deiyai adalah berumur produktif yakni umur antara 31-40 tahun.

b) Identitas Responden menurut Jenis Kelamin

Jenis kelamin (*gender*) adalah salah satu hal yang terpenting dalam penelitian ini, dimana dapat dikategorikan atas dua bagian yakni pria dan wanita. Hasil selengkapnya dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi Jawaban Responden	
	(Orang)	(%)
Pria	46	57,5
Wanita	34	42,5
	80	100,0

Sumber : Hasil olahan data, 2021

Berdasarkan tabel 5.2 yakni identitas responden menurut jenis kelamin (*gender*) maka dari 80 responden yang menjadi sampel penelitian ini, maka tingkat proporsi pria lebih banyak yakni sebanyak 46 orang (57,5%) jika dibandingkan dengan yang berjenis kelamin wanita yakni sebanyak 34 orang (42,5%). Hal ini dipersepsikan bahwa pegawai yang bekerja pada 3 SKPD Kabupaten Deiyai didominasi oleh pegawai pria.

c) Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh responden sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan

dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Deiyai. Karakteristik tingkat pendidikan terakhir responden dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 5.3. Identitas responden menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan Terakhir	Frekuensi Jawaban Responden	
	(Orang)	(%)
SMA	12	15,0
D3	5	6,3
S1	61	76,3
S2	2	2,5
	80	100,0

Sumber : Hasil olahan data, 2021

Dari tabel 5.3 diketahui bahwa responden yang mempunyai jumlah terbanyak berdasarkan tingkat pendidikan adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir yakni S1 dengan jumlah responden sebanyak 61 orang (76,3%), kemudian responden yang mempunyai tingkat pendidikan terakhir SMA yakni sebanyak 12 orang (15%). Hal ini dipersepsikan bahwa pegawai yang bekerja pada 3 SKPD Kabupaten Deiyai rata-rata lulusan Sarjana (S1).

d) Identitas Responden Menurut Masa Kerja

Lama bekerja menggambarkan jangka waktu responden mengabdikan dirinya pada organisasi. Deskripsi profil responden berdasarkan masa bekerja dalam penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 5.4. Identitas responden
menurut Masa Kerja**

Masa Kerja	Frekuensi Jawaban Responden	
	(Orang)	(%)
< 3 tahun	22	27,5
3,1 – 5 tahun	20	25,0
5,1 – 10 tahun	28	35,0
> 10 tahun	10	12,5
	80	100,0

Sumber : Hasil olahan data, 2021

Data tersebut di atas terlihat bahwa rata-rata masa kerja responden dalam penelitian ini didominasi oleh masa kerja antara 5,1-10 tahun yakni sebanyak 28 orang (35%), kemudian masa kerja dibawah dari 3 tahun dengan jumlah responden sebanyak 22 orang (27,5%). Hal ini dipersepsikan bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja pada 3 SKPD Kabupaten Deiyai rata-rata berpengalaman karena memiliki masa kerja antara 5,1-10 tahun.

e) Identitas Responden Menurut Status Pernikahan

Status perkawinan adalah merupakan tingkatan responden dalam keluarga, apakah sudah menikah atau belum menikah. Untuk lebih jelasnya proporsi pengelompokkan responden berdasarkan status pernikahan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 5.5. Identitas responden menurut Status Pernikahan

Status	Frekuensi Jawaban Responden	
	(Orang)	(%)
Menikah	63	78,8
Belum menikah	17	21,3
	80	100,0

Sumber : Hasil olahan data, 2021

Proporsi responden berdasarkan status pernikahan maka dari 80 responden yang diteliti, didominasi oleh responden yang berstatus menikah dengan jumlah responden sebanyak 63 orang (78,8%), sedangkan sisanya adalah berstatus belum menikah yakni sebanyak 17 orang (21,3%). Hal ini dipersepsikan bahwa sebagian besar pegawai yang bekerja pada 3 SKPD Kabupaten Deiyai rata-rata sudah menikah atau berkeluarga.

B. Deskripsi Distribusi Tanggapan Responden mengenai Akuntabilitas, Transparansi serta Kinerja Pemerintah Daerah

Pada penelitian ini diperlukan gambaran mengenai data yang diambil di lapangan untuk mengetahui persepsi dari responden terhadap indikator dari sebuah variabel penelitian yang diamati yaitu akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan kinerja pemerintah daerah (Y). Data mengenai variabel yang diteliti tersebut bersumber dari kuesioner yang dibagikan terhadap 80 orang responden, dimana kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* dengan alternatif jawaban sebagai berikut: Sangat Setuju (SS) = 5;

Setuju (S) = 4; Ragu-ragu (RR) = 3; Tidak Setuju (TS) = 2; Sangat Tidak Setuju (STS) = 1.

Untuk mengetahui persepsi responden, maka terlebih dahulu diperlukan skor nilai rata-rata setiap indikator dari masing-masing variabel dengan mempergunakan formula perhitungan kelas interval sebagai berikut :

$$\text{Panjang kelas interval} = \frac{\text{Titik tertinggi} - \text{titik terendah}}{5 \text{ (sebagai skala pengukuran)}} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Selanjutnya dari perhitungan rumus panjang kelas interval maka selanjutnya dapat dibuatkan kriteria skor yaitu sebagai berikut :

- a) 1,00 - < 1,79 = Kategori sangat rendah
- b) 1,80 - < 2,59 = Kategori rendah
- c) 2,59 - < 3,39 = Kategori sedang
- d) 3,40 - < 4,19 = Kategori tinggi
- e) 4,20 - < 5,00 = Kategori sangat tinggi

Untuk mendapatkan persepsi responden terhadap jawaban masing-masing variabel akan didasarkan pada rentang skor jawaban sebagaimana terlihat pada uraian berikut ini.

a) Persepsi Responden mengenai Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam sektor publik memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan karena penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan berasal dari masyarakat. Dari 80 eksamplar kuesioner yang disebarkan, maka persepsi responden mengenai akuntabilitas dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.6. Persepsi Responden mengenai Akuntabilitas

No.	Pernyataan	Tanggapan Responden					Mean
		STS	TS	RR	S	SS	
a.	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran						
1.	Ditempat saya bekerja sudah ada jaminan kepatuhan hukum dan peraturan lainnya dalam menjalankan tugas	-	-	17 (21,3)	43 (53,8)	20 (25)	4,04
2.	Ditempat saya bekerja telah memberlakukan pemberian sanksi kepada setiap pegawai yang menyalahgunakan jabatan, korupsi dan kolusi	-	-	18 (22,5)	41 (51,3)	21 (26,3)	4,04
b.	Akuntabilitas Manajerial						
3.	Setiap pegawai dalam bekerja memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan organisasinya secara efisien efektif	-	-	16 (20)	42 (52,5)	22 (27,5)	4,07
4.	Ditempat saya bekerja, setiap pegawai mampu mempertanggungjawabkan atas seluruh proses penyusunan laporan kinerja dengan baik	-	-	12 (15)	47 (58,8)	21 (26,3)	4,11
c.	Akuntabilitas Program						
5.	Setiap pegawai dalam bekerja mampu bertanggung-jawab atas pelaksanaan program yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan	-	-	24 (30)	35 (43,8)	21 (26,3)	3,96
6.	Penyusunan program kegiatan yang telah sesuai dengan prosedur yang	-	-	18 (22,5)	43 (53,8)	19 (23,8)	4,01

No.	Pernyataan	Tanggapan Responden					Mean
		STS	TS	RR	S	SS	
	telah ditetapkan selama ini						
d.	Akuntabilitas Kebijakan						
7.	Setiap pegawai yang bekerja mampu mempertanggungjawabkan atas peneta-pan tujuan kebijakan yang memperhatikan kepentingan organisasi	-	-	23 (28,8)	41 (51,3)	16 (20)	3,91
8.	Setiap pegawai yang bekerja mampu mempertanggungjawabkan atas dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang sudah di-tetapkan	-	-	13 (16,3)	44 (55)	23 (28,8)	4,12
e.	Akuntabilitas financial/keuangan						
9.	Pegawai bagian keuangan mampu membuat laporan keuangan setahun sekali	-	-	11 (13,8)	55 (68,8)	14 (17,5)	4,04
10.	Setiap pegawai bagian keuangan dalam menggunakan dana publik sudah di-alokasikan secara efisien dan efektif dan tidak ada pemborosan	-	-	19 (23,8)	49 (61,3)	12 (15)	3,91
Total rata-rata indeks variabel akuntabilitas							4,02

Sumber : Lampiran SPSS, 2021

Berdasarkan persepsi responden mengenai akuntabilitas, maka diperoleh total rata-rata indeks variabel akuntabilitas sebesar 4,02 dan apabila dilihat dari kriteria skor maka dipersepsikan tinggi. Ini menunjukkan bahwa indikator yang memberikan pengaruh terbesar adalah akuntabilitas kebijakan dengan pernyataan setiap pegawai

yang bekerja mampu mempertanggungjawabkan atas dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang sudah ditetapkan (4,12), kemudian indikator akuntabilitas manajerial dengan pernyataan di tempat saya bekerja, setiap pegawai mampu mempertanggungjawabkan atas seluruh proses penyusunan laporan kinerja dengan baik (4,11), diikuti dengan pernyataan bahwa setiap pegawai dalam bekerja memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan organisasi-nya secara efisien dan efektif (4,07).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai sudah akuntabel atau bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan pada Pemerintah Daerah kabupaten Deiyai. Dimana akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggung-jawabannya kepada publik. Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik.

b) Persepsi Responden mengenai Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan. Adapun persepsi responden mengenai transparansi pada pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.7. Persepsi Responden mengenai Transparansi

No.	Pernyataan	Tanggapan Responden					Mean
		STS	TS	RR	S	SS	
a.	Informatif						
1.	Informasi yang diberikan kepada publik dapat me-ningkatkan transparansi anggaran	-	13 (16,3)	26 (32,5)	28 (35)	13 (16,3)	3,51
2.	Adanya kemudahan untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran	-	8 (10)	34 (42,5)	24 (30)	14 (17,5)	3,55
b.	Keterbukaan						
3.	Musrembang dapat me-ningkatkan kebijakan transparansi anggaran	-	23 (28,8)	23 (28,8)	20 (25)	14 (17,5)	3,31
4.	Pengumuman tentang anggaran didapat dalam setiap waktu	-	30 (37,5)	10 (12,5)	24 (30)	16 (20)	3,32
Total rata-rata indeks variabel transparansi							3,42

Sumber : Lampiran SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 5.7 yakni persepsi responden mengenai transparansi maka diperoleh total rata-rata indeks variabel transparansi sebesar 3,42 dan apabila dilihat dari kriteria skor maka dipersepsikan tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa indikator yang memberikan kontribusi tertinggi adalah informatif dengan pernyataan adanya kemudahan untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran (3,55), diikuti dengan pernyataan bahwa informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran dengan skor (3,51).

Sedangkan indikator yang memberikan kontribusi terendah adalah keterbukaan dengan pernyataan pengumuman tentang anggaran didapat dalam setiap waktu (3,32), begitu pula dengan pernyataan bahwa Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran (3,31). Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah dijalankan secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan, sehingga hal ini dapat mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Deiyai.

c) Persepsi Responden mengenai Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah atau organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan di Kantor Pemerintah Kabupaten Deiyai. Dari hasil penyebaran kuesioner maka diperoleh persepsi atau tanggapan responden mengenai kinerja pemerintah daerah yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.8. Persepsi Responden mengenai Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Pernyataan	Tanggapan Responden					Mean
		STS	TS	RR	S	SS	
a.	Ekonomi						
1.	Anggaran dikelola secara ekonomis untuk mencapai pengeluaran yang sesuai dengan yang ditargetkan	-	-	21 (26,3)	51 (63,8)	8 (10)	3,84
2.	Adanya penerapan prinsip ekonomis dalam penggunaan anggaran	-	-	17 (21,3)	50 (62,5)	13 (16,3)	3,95
b.	Efisiensi						
3.	Anggaran dikelola secara efisien dengan penggunaan anggaran terendah dalam pencapaian tujuan tertentu.	-	-	14 (17,5)	43 (53,8)	23 (28,8)	4,11
4.	Anggaran dikelola secara efisien dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang ditetapkan	-	-	14 (17,5)	44 (55)	22 (27,5)	4,10
c.	Efektifitas						
5.	Anggaran dikelola secara efektif, dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan	-	3 (3,8)	12 (15)	28 (35)	37 (46,3)	4,24
6.	Adanya penerapan prinsip efektif dalam penggunaan anggaran.	-	-	10 (12,5)	32 (40)	38 (47,5)	4,35
Total rata-rata indeks variabel Kinerja Pemerintah Daerah							4,10

Sumber : Lampiran SPSS, 2021

Berdasarkan tabel persepsi responden mengenai kinerja pemerintah daerah maka diperoleh total rata-rata indeks variabel kinerja pemerintah daerah sebesar 5,10 dan

apabila dilihat dari kriteria skor maka dipersepsikan baik atau tinggi. Dimana dapat dilihat bahwa indikator yang memberikan kontribusi tertinggi adalah pada indikator efektivitas dengan adanya penerapan prinsip efektif dalam penggunaan anggaran (4,35), diikuti dengan pernyataan anggaran dikelola secara efektif, dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan (4,24). Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah sudah efektif, karena setiap anggaran yang dilakukan mencapai hasil yang telah ditargetkan.

C. Uji Instrumen Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah pegawai yang bekerja pada 3 SKPD Kabupaten Deiyai yang berjumlah sebanyak 80 orang pegawai. Tingkat pengembalian kuesioner dalam penelitian ini (*Response rate*) yakni sebesar 100%. Sebelum dilakukan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka akan dilakukan uji instrument penelitian guna menguji seberapa valid dan andalnya suatu instrument yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner atau skala, apakah item pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Cara yang dilakukan dalam analisis ini, adalah dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai

koefisien korelasi yang *overestimasi*. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi koefisien item total yang *overestimasi* (estimasi nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya). Atau dengan kata lain analisis ini menghitung korelasi tiap item dengan skor item yang akan dihitung.

Menurut Sugiyono (2017:143) bahwa bila harga korelasi dibawah 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang. Setelah dilakukan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 23, maka akan dapat disajikan hasil uji validitas dari tiap item pernyataan pada masing-masing variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya uji validitas atas variabel akuntabilitas dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 5.9. Uji Validitas Item Pernyataan Akuntabilitas

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{kritis}	Keputusan
X _{1.1.1}	0,732	0,30	Valid
X _{1.1.2}	0,576	0,30	Valid
X _{1.2.1}	0,639	0,30	Valid
X _{1.2.2}	0,556	0,30	Valid
X _{1.3.1}	0,461	0,30	Valid
X _{1.3.2}	0,506	0,30	Valid
X _{1.4.1}	0,356	0,30	Valid
X _{1.4.2}	0,352	0,30	Valid
X _{1.5.1}	0,510	0,30	Valid
X _{1.5.2}	0,444	0,30	Valid

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 5.9 yaitu hasil uji validitas dengan 10 item pernyataan akuntabilitas terlihat bahwa dengan kisaran korelasi 0,352-0,732, hal ini menunjukkan bahwa kesepuluh item pernyataan memiliki kisaran korelasi yang lebih besar

dari 0,30. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan sudah dinyatakan valid.

Kemudian hasil uji validitas untuk variabel transparansi dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 5.10. Uji Validitas Item
Pernyataan Transparansi**

Item Pernyataan	r hitung	r kritis	Keputusan
X _{2.1.1}	0,840	0,30	Valid
X _{2.1.2}	0,754	0,30	Valid
X _{2.2.1}	0,681	0,30	Valid
X _{2.2.2}	0,813	0,30	Valid

Sumber : Data diolah, 2021

Setelah disajikan nilai korelasi dari setiap item pernyataan maka dapat diketahui bahwa kisaran korelasi 0,681-0,840, karena kisaran korelasi dari setiap item pernyataan yang lebih besar dari 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pernyataan sudah valid. Selanjutnya akan disajikan uji validitas untuk kinerja pemerintah daerah yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 5.11. Uji Validitas Item Pernyataan Kinerja
Pemerintah Daerah**

Item Pernyataan	r hitung	r kritis	Keputusan
Y _{1.1}	0,575	0,30	Valid
Y _{1.2}	0,519	0,30	Valid
Y _{2.1}	0,656	0,30	Valid
Y _{2.2}	0,675	0,30	Valid
Y _{3.1}	0,569	0,30	Valid
Y _{3.2}	0,517	0,30	Valid

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.11 yakni hasil uji validitas untuk kinerja pemerintah daerah yang memiliki kisaran korelasi antara 0,517-0,675, karena keenam butir pernyataan lebih besar dari 0,30 maka tiap-tiap butir pernyataan sudah dapat dikatakan valid. Sehingga dapat disimpulkan masing-masing butir pernyataan pada setiap variabel penelitian (akuntabilitas, transparansi dan kinerja pemerintah daerah) tidak ada yang lebih kecil dari 0,30, berarti dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan pada masing-masing variabel penelitian sudah dikatakan valid dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

b) Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam pengujian reliabilitas pada penelitian ini digunakan dengan *Cronbachs Alpha*. Menurut Ghozali (2018:46) bahwa suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbachs Alpha* > 0,70.

Sehingga dengan hasil pengolahan data kuesioner dengan menggunakan program SPSS Versi 23 maka dapat disajikan hasil uji reliabilitas melalui tabel berikut ini :

Tabel 5.12. Analisis Uji Reliabilitas

No.	Variabel Penelitian	Item Pernyataan	<i>Cronbachs Alpha</i>	<i>Cronbachs Alpha standar</i>	Kesimpulan
1.	Akuntabilitas	10	0,825	0,70	Andal/ <i>Reliabel</i>
2.	Transparansi	4	0,893	0,70	Andal/ <i>Reliabel</i>
3.	Kinerja pemerintah daerah	6	0,816	0,70	Andal/ <i>Reliabel</i>

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 5.12 yakni hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa masing-masing item pernyataan pada setiap variabel dalam penelitian ini tidak ada yang memiliki nilai *cronbachs alpha* yang lebih kecil dari 0,70. Hal ini dapat dilihat dari variabel akuntabilitas dengan 10 item pertanyaan memiliki nilai *cronbach's alpha* $0,825 > 0,70$ berarti kesepuluh item pertanyaan sudah dinyatakan andal/reliabel, kemudian variabel transparansi dengan 4 item pertanyaan yang memiliki nilai *cronbach's alpha* $0,893 > 0,70$ berarti dapat dikatakan bahwa item pernyataan sudah andal/reliabel. Variabel kinerja pemerintah daerah dengan 6 item pernyataan dengan nilai *cronbach's alpha* sebesar $0,816 > 0,70$ berarti keenam item pernyataan sudah andal/reliabel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan dari masing-masing variabel penelitian sudah andal/reliabel.

D. Analisis Regresi dan Korelasi Linear Berganda

Analisis regresi dan korelasi linear berganda bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependent. Penelitian ini menggunakan variabel akuntabilitas (X_1), dan trans-paransi (X_2) sebagai variabel bebas, dan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel terikat (Y). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software SPSS Versi 23, yang dapat dilihat melalui tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.13. Analisis Regresi dan Korelasi Linear Berganda mengenai Akuntabilitas, Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.095	.410		2.670	.009
Akuntabilitas	.578	.103	.489	5.624	.000
Transparansi	.198	.048	.359	4.131	.000

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 5.13 yaitu menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kinerja pemerintah di Kabupaten Deiyai yang dapat disajikan persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = b_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 1,095 + 0,578X_1 + 0,198X_2$$

Dari persamaan regresi linear berganda yang telah disajikan di atas, maka dapat disajikan interpretasi yaitu sebagai berikut :

1. $\beta_0 = 1,095$ yang dapat diartikan jika akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2) adalah constant (sama dengan 0) maka kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 1,095.
2. $\beta_1 X_1 = 0,578$, artinya setiap kenaikan 1 point akuntabilitas dapat diikuti oleh adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,578 point. Hal ini dapat diindikasikan bahwa semakin tinggi akuntabilitas maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai akan semakin meningkat pula.
3. $\beta_2 X_2 = 0,198$, artinya setiap kenaikan 1 point transparansi dapat diikuti oleh adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,198 point. Hal ini dapat diindikasikan bahwa semakin tinggi transparansi maka akan mempengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai.

Dari hasil analisis regresi yang telah dilakukan maka temuan empiris yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai.

E. Koefisien Determinasi (R^2)

Kemudian untuk mengetahui seberapa besar kekuatan atau kelemahan variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah maka

dapat dilihat dari hasil nilai koefisien korelasi yang dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.14. Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670 ^a	.449	.435	.37180

a. Predictors: (Constant), Transparansi , Akuntabilitas

Dari data analisis koefisien korelasi dan determinasi maka diperoleh nilai korelasi atau nilai $R = 0,670$, yang dapat diartikan bahwa korelasi antara akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan yang kuat terhadap kinerja pemerintah daerah, sebab r positif dan mendekati 1. Sedangkan koefisien determinan (RSquare) sebesar 0,449, hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel bebas (akuntabilitas dan transparansi) terhadap variabel terikat (kinerja pemerintah daerah) sebesar 44,9%. Sedangkan sisanya sebesar 55,1% ($1 - 0,449 \times 100$) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

F. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis maka dapat dilakukan 2 pengujian yakni uji parsial (uji t) dan uji serempak (uji f). Hasil pengujian parsial dari masing-masing variabel bebas yang diteliti dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian secara parsial (uji t) akuntabilitas dengan kinerja pemerintah daerah maka diperoleh t_{hitung} sebesar 5,624 dan nilai signifikan sebesar 0,000, karena dengan nilai signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. Hal ini dapat diindikasikan bahwa secara empiris menemukan bahwa akuntabilitas memberikan pengaruh secara nyata dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai, dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, diterima.

2. Pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah

Hasil pengujian secara parsial (uji t) diperoleh nilai $t_{hitung} = 4,131$ dan nilai $sign = 0,000$, karena dengan nilai $sign 0,000 < 0,05$ maka dapat dikatakan ada pengaruh positif dan signifikan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. Hal ini dapat diindikasikan bahwa transparansi memberikan pengaruh secara nyata dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah, diterima.

Kemudian untuk menguji pengaruh secara serempak atau bersama-sama antara variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah maka

digunakan pengujian simultan (Uji F), yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 5.15. Uji Serempak

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.672	2	4.336	31.366	.000 ^b
	Residual	10.644	77	.138		
	Total	19.316	79			

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Berdasarkan data hasil uji serempak maka diperoleh nilai $F_{hitung} = 31,366$ dan memiliki nilai sign = 0,000, dengan nilai sign $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memberikan pengaruh secara serempak atau bersama-sama terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diberikan penjelasan dari masing-masing hasil analisis yang dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1) Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh nilai koefisien regresi untuk akuntabilitas sebesar 0,576, selain itu memiliki nilai sign. $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Deiyai. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Kusumastuti (2014:2) bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan

kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya. Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner maka diperoleh temuan empirik di lapangan bahwa pengelolaan keuangan pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai sudah dipersepsikan baik atau dengan kata lain sudah dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini dapat dilihat untuk akuntabilitas hukum dan kejujuran rata-rata dipersepsikan bahwa dalam pengelolaan keuangan selalu ada jaminan kepatuhan hokum dan peraturan lainnya, selain itu memberlakukan sanksi kepada setiap pegawai yang menyalahgunakan jabatan, dan KKN. Hasil temuan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah ada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Kemudian ditinjau dari akuntabilitas manajerial, hasil temuan bahwa setiap pegawai mampu mempertanggungjawabkan atas seluruh proses penyusunan laporan kinerja dengan baik, begitu pula bahwa setiap pegawai dalam bekerja memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan organisasinya secara efisien efektif. Ditinjau dari akuntabilitas program dimana penyusunan program kegiatan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan selama ini, begitu pula bahwa setiap pegawai

dalam bekerja mampu bertanggungjawab atas pelaksanaan program yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Ditinjau dari akuntabilitas kebijakan dimana sebagian besar pegawai memberikan setuju bahwa setiap pegawai yang bekerja mampu mempertang-gungjawabkan atas dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang sudah ditetapkan, begitu pula bahwa setiap pegawai yang bekerja mampu mempertang-gungjawabkan atas penetapan tujuan kebijakan yang memperhatikan kepentingan organisasi. Hasil temuan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deiyai telah mendukung upaya BPK RI dalam mewujudkan visi dan misinya yakni menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan Berkualitas dan Bermanfaat. Sedangkan ditinjau dari akuntabilitas finansial/keuangan, hasil temuan bahwa pegawai bagian keuangan mampu membuat laporan keuangan setahun sekali, begitu pula bahwa setiap pegawai bagian keuangan dalam menggunakan dana publik sudah dialokasikan secara efisien dan efektif dan tidak ada pemborosan. Ini dapat dilihat bahwa anggaran daerah sudah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif karena pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 sebagian besar sesuai dengan *action plan* yang dibuat oleh Bupati Deiyai.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2017) dan Wiguna, dkk (2015)

dimana hasil temuan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah.

2) Pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai

Hasil analisis persamaan regresi maka diperoleh koefisien regresi untuk transparansi yakni sebesar 0,198 dan memiliki nilai sign $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Tanjung (2014:11) bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Hasil penyebaran kuesioner maka dikatakan bahwa transparansi sudah dipersepsikan baik oleh responden, hal ini dapat dilihat dari indikator informatif bahwa informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran, begitu pula dengan adanya kemudahan untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran. Sedangkan ditinjau dari keterbukaan bahwa pengumuman tentang anggaran didapat dalam setiap waktu, begitu pula bahwa Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran.

Penelitian Adiwirya dan Sudana (2015) dan Riswanto (2016) menemukan bahwa secara parsial transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis regresi linear berganda maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. Dengan kata lain semakin tinggi akuntabilitas maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai akan semakin meningkat pula.
2. Berdasarkan hasil persamaan regresi atas transparansi dengan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai, dimana semakin tinggi transparansi pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai akan semakin meningkat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar perlunya ditingkatkan akuntabilitas kebijakan terkait dengan kemampuan pegawai dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan sesuai penetapan tujuan kebijakan yang memperhatikan kepentingan organisasi, selain itu perlunya dilakukan kegiatan *monitoring* atau pengawasan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh bagian keuangan agar dalam menggunakan dana publik harus dilalokasikan secara efisien dan efektif agar tidak terjadi pemborosan.
2. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah maka perlunya diperhatikan mengenai masalah transparansi khususnya dalam hal pelaksanaan Musrembang agar dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran yang dilakukan, selain itu sebaiknya dilakukan pengumuman tentang anggaran yang didapat dalam setiap waktu sehingga diketahui oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya dan Sudana (2015) Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi Home Archives*, Home Vol.2 No.2 (2015)
- Ait Novatiani, R. (2019) Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, Vol 10 No 1 Maret 2019. Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana. Universitas Pendidikan Indonesia. ISSN : 2337-411X (print)-ISSN.2503-3522 (Online).
- Abdul Halim. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Keuangan Daerah. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Abdul Hafiz Tanjung. 2014. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Penerbit : BPFE UGM. Yogyakarta
- Adisasmita, Rahardjo, 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Adrian Sutedi. 2011. *Good Corporate Governance*. Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta
- Adrianto, Nico. 2017. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Penerbit : Bayumedia Publishing, Malang
- Agoes, Sukrisno. 2013. Ardana, I Cenik. Etika Bisnis Dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Penerbit : Salemba Empat. Jakarta

- Ash-shidiqq, Ellectrananda Anugerah, Hindrawan Wibisono. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 110-131
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga. Penerbit : Erlangga, Jakarta
- Coryanata, Isma. (2015). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X.
- Chabib Soleh dan Suripto (2011) Menilai Kinerja Pemerintah, Penerbit : Fokus Media, Bandung
- Darmawan, I. G. H. & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol 9 (No. 1), hal 143-161
- Dedi Nordiawan. 2012. Akuntansi Pemerintahan Edisi kesatu. Penerbit : Salemba Empat, Jakarta
- Fahmi, Irham. 2014. Analisa Kinerja Keuangan. Penerbit : Alfabeta, Bandung
- Ganie Rochman, 2012, *Good Governance*, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya Dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik), Penerbit Komnas HAM, Jakarta.

- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Dito Aditia Darma Nasutio, (2017) Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan Vol. 2 No. 3 Hlm. 149-16.
- Fanny Jitmau, dkk (2017) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong) Jurnal Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. <file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/16036-32156-1-SM.pdf>.
- Fifit Purnama (2016) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.1, No.2, (2016) Halaman 01-15.
- Halim, Abdul. 2016. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta
- Krina, Loina Lalolo. 2013. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta : Sekretariat *Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Lukito, Penny, Kusumastuti, 2014, Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik : Tantangan Demokrasi Ke Depan. Penerbit : Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

- Lucy Auditya, (2013) Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1, 2013: 21-41 ISSN 2303-0348.
- Md Budi Sastrawan Wiguna. dkk (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Home > Vol. 3 No.1 (2015) e-Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA.
- Made Budi Sastra Wiguna, (2015) Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi (Volume 3 No.1 Tahun 2015).
- Mahsun, Moh, Sulistyowati, Firma, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE.Yogyakarta.
- Mahmudi, 2016, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, edisi terbaru, Penerbit : Andi Yogyakarta
- Muhamad Akram Khan. 2012. *Discussion Paper By Office The Auditor General of Canada and Treasury Board Secretariat Canada*.
- Mursyidi. 2015. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Penerbit : Refika Aditama. Bandung
- Novya Nurul Istiqomah, (2017) Analisis Akuntabilitas, Tarnsparansi, Partisipasi Masyarakat dan pengawasan

Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Kantor Desa Di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi). Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.

PP Nomor 71 Tahun 2010, Penerapan SAP Berbasis Akruar

PP. Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2013 Pengelolaan Keuangan Daerah

Renz, O. David. © 2016. The Jossey-Bass handbook of nonprofit leadership and management : Fourth Edition. John Wiley&Sons. New Jersey, United States of America

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2015. Manajemen Pelayanan. Penerbit : Pusataka Pelajar. Yogyakarta

Riswanto, Natak, (2016) Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Penge-lolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Mahasiswa <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75336>

Sunjoyo, dkk. 2013. Aplikasi SPSS untuk Smart Riset, Penerbit : Alfabeta. Bandung

Supardi. 2013. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika Yang Lebih Komprehensif*. Jakarta, Penerbit : Change Publication

Sekaran, Uma dan Roger Bougie, 2017, Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian, Edisi keenam, Buku satu, Cetakan Kedua, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta

Supriatna, Tjahya.2015. Akuntabilitas Publik. Penerbit : BumiAksara. Jakarta

- Scott, R. William. 2015. *Financial Accounting Theory. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall: Toronto.*
- Tahir Arifin. 2015. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Peme-rintah Daerah, Penerbit : Alfabeta, Bandung*
- Toni Nurhadianto, dkk (2019) Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Da-erah : Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Technobiz Vol. 3, No. 5, 2019, 25-30. ISSN 2655-3457.*
- Ulum, Ihyaul., 2015, *Intellectual Capital Konsep dan Kajian Empiris. Graha Ilmu, Yogyakarta.*
- Xaba, Mgadla. 2010. *Financial Accountability At School: Challenges And Implications. Journal Of Education, No 50. 2010*
- Zulkifli Umar, dkk (2018) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Kolegial Vol.6, No.2. Desember 2018 P-ISSN 2088-5644; E-ISSN 2614-008X.*